

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena migrasi menjadi hal yang umum di era globalisasi. Secara definitif, migrasi adalah proses perpindahan baik melintasi perbatasan internasional atau pun di dalam suatu negara.¹ Organisasi International for Migration mendefinisikan migran sebagai istilah yang mencakup semua aktifitas di mana keputusan untuk bermigrasi diambil secara bebas oleh individu yang bersangkutan untuk “kenyamanan pribadi” tanpa ada intervensi dari faktor eksternal yang memaksa.²

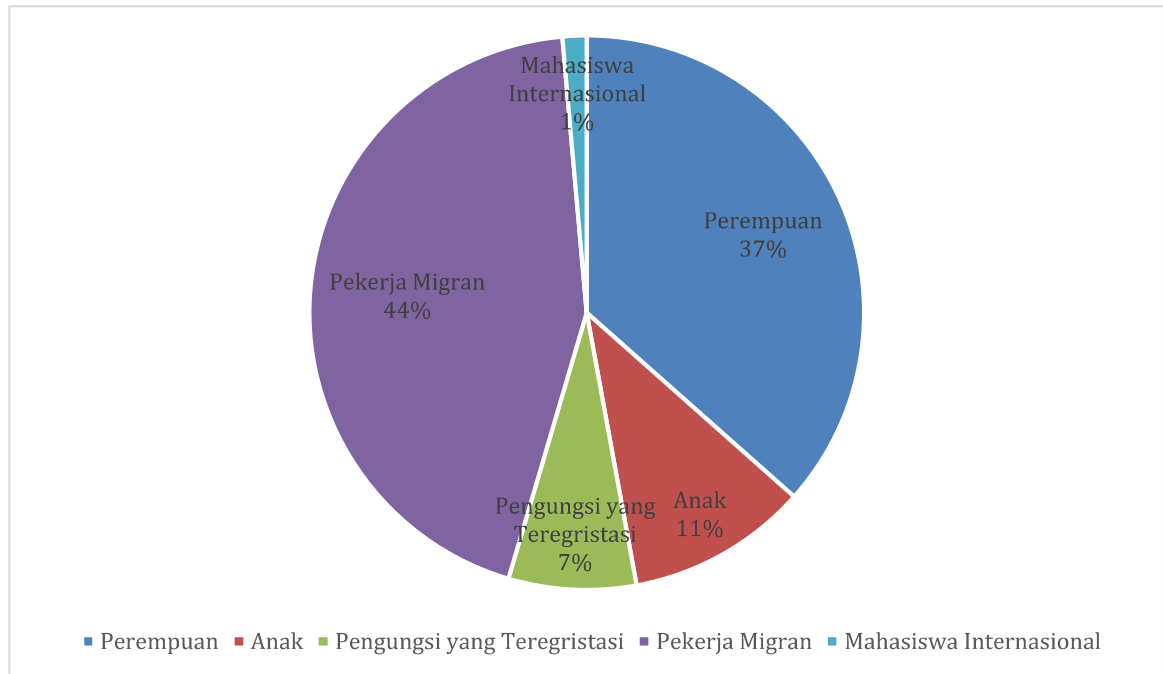
Di level internasional, untuk pertama kalinya migrasi internasional diangkat menjadi agenda global pada 2015 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diadopsi pada Agenda 2030 berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development (SDGs). Seruan utamanya adalah “*leave no one behind*”, salah satu contoh targetnya adalah seruan kepada negara-negara untuk memberikan fasilitas migrasi dan mobilitas orang dengan tertib, aman, teratur, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik (SDGs, target 10.7). Dengan diangkatnya migrasi internasional menjadi agenda SDGs mampu meningkatkan data-data migrasi, karena negara-negara perlu menyediakan data yang sebanding di

¹ Council of Europe, “Migration,” diakses Maret 30, 2022, <https://www.coe.int/en/web/compass/migration>.

² IOM UN MIGRATION, “Glossary on Migration ” (2019), diakses Maret 30, 2022, www.iom.int.

seluruh topik migrasi untuk memantau kemajuan target, serta meningkatkan pemilahan semua data berdasarkan status migrasi.³

Gambar 1.1 Bagan Persentase Populasi Migran Internasional



Sumber: UN DESA 2018, UNHCR 2018, ILO 2013, UNESCO 2017

Secara keseluruhan, perkiraan jumlah migran internasional telah meningkat selama lima dekade terakhir. Total perkiraan 281 juta orang yang tinggal di negara selain negara kelahiran mereka pada tahun 2020 adalah 128 juta lebih banyak daripada tahun 1990, dan lebih dari tiga kali lipat jumlah perkiraan pada tahun 1970.⁴ Pekerja migran berada di posisi pertama yang memiliki jumlah paling besar

³ Elisa Mosler Vidal and Jasper Dag Tjaden, *Global Migration Indicators 2018: Insights from the Global Migration Data*, 2018, www.iom.int/Awww.migrationdataportal.org.

⁴ IOM UN MIGRATION, "Definition of Migration and Migrant IOM, UN Migration," diakses Maret 30, 2022, <https://www.iom.int/about-migration>.

pada populasi migrasi di dunia, 44% dari 281 juta atau senilai dengan 150.3 juta jiwa.⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan individu atau kelompok memilih untuk melakukan migrasi internasional cukup beragam. Faktor tersebut dapat diketahui dengan mengenal beberapa tipe migrasi. (1) *Temporary migrant*, pekerja migran; (2) *Highly skilled and business migrants*, profesional, yang bergerak dalam pasar tenaga kerja internal perusahaan transnasional dan organisasi internasional; (3) *Irregular migrant*, orang-orang yang masuk ke negara lain tanpa dokumen dan perijinan legal; (4) *Forced migrants*, seperti pengungsi, pencari suaka, atau orang-orang yang dipaksa berpindah karena eksternal faktor, seperti konflik atau bencana alam; (5) *Family members*, yang memilih untuk bermigrasi mengikuti keluarganya yang sudah bermigrasi terlebih dahulu; dan (5) *Return migrants*, orang-orang yang kembali ke negara asalnya setelah beberapa waktu di negara lain.⁶

Pada penelitian ini akan berfokus pada tipe *temporary migrant* atau migrasi temporer dengan keterlibatan para pekerja migran, negara, dan aktor non-negara. Faktor utama yang mendorong pekerja migran untuk bermigrasi adalah faktor ekonomi. Narasi yang sering terdengar adalah tingginya gaji di negara penerima (*host country*) akan membantu perekonomian di negara asal (*home country*). Aktivitas ini tentu menjadi pedang bermata dua bagi negara penerima dan negara asal. Bagi negara pengirim, kerap kali hak-hak para pekerja migran dilanggar, adanya diskriminasi, rasisme, hingga eksploitasi. Sedangkan bagi negara penerima

⁵ Council of Europe, "Migration."

⁶ Ibid.

tantangan utamanya adalah keamanan nasional dan jaminan pekerjaan bagi warga negara asli yang bersaing dengan pekerja migran.

Permasalahan pertama yang mendorong terjadinya migrasi adalah ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Sehingga, para pekerja migran melihat adanya keuntungan dari migrasi ke negara maju. Negara-negara maju memiliki akses dan modal seperti teknologi, bangunan, infrastruktur, dan sebagainya. Hal ini membuat pekerja di negara-negara maju jauh lebih produktif daripada yang setara dengan mereka namun di negara berkembang. Ketika para pekerja bermigrasi ke negara maju, mereka juga dapat memanfaatkan modal dan teknologi dari negara maju sehingga mendorong mereka untuk lebih produktif dari sebelumnya.⁷

Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak mengirim warga negaranya untuk bermigrasi ke negara-negara lain. Sejak krisis ekonomi 1998, sekitar 400.000 orang setiap tahunnya tercatat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut dengan PMI.⁸ Faktor tingginya jumlah pengangguran dan rendahnya jaminan kesejahteraan membuat banyak individu mencari kesempatan pekerjaan di luar negeri. Selain itu, pemerintah juga memberi dukungan dengan kebijakan dan program penempatan PMI melalui memorandum, kesepakatan, dan kerja sama dengan negara lain. Hal tersebut menjadi solusi yang juga disediakan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.⁹

⁷ Philippe Legrain, *Immigrants: Your Country Needs Them* (Pinceton and Oxford: Princeton University Press, 2007).

⁸ Sali Susiana, *Rencana Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Sektor Informal*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI), vol. VII, 2015, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-VII-5-I-P3DI-Maret-2015-11.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-5-I-P3DI-Maret-2015-11.pdf).

⁹ Hidayat, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 105.

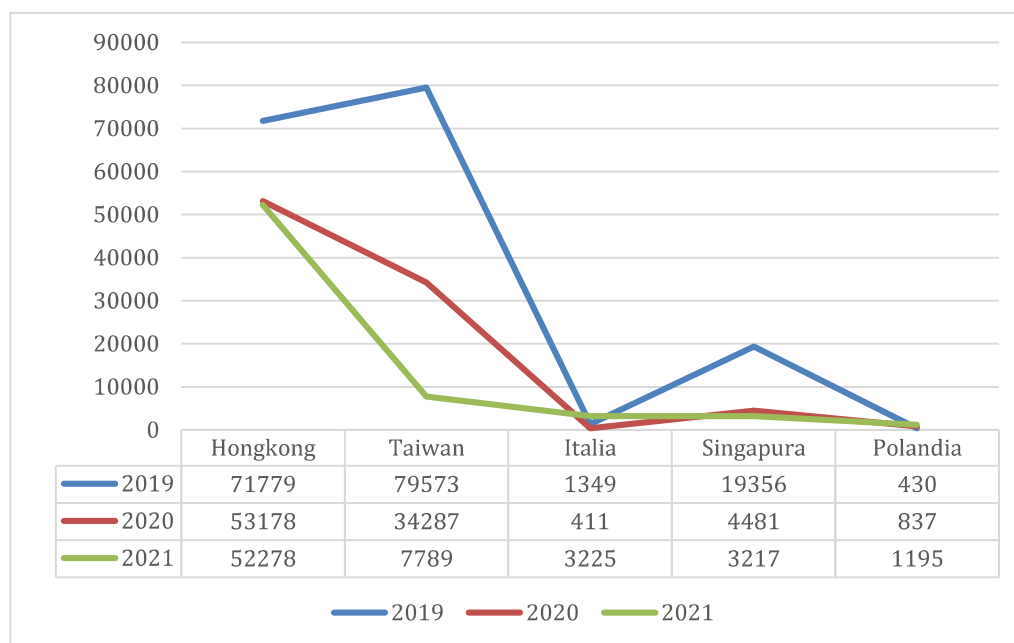
Perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh pemerintah melalui yuridis domestik, Indonesia juga turut meratifikasi konvensi Internasional untuk melindungi warganya yang bekerja di luar teritori. Salah satunya adalah dengan meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tentang jaminan hak-hak pekerja migran dan keluarga yang ikut bermigrasi.¹⁰

Dilansir dari situs berita Kompas, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) memaparkan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2021 adalah 72.624 orang, dengan 16.809 orang PMI formal dan 55.815 orang PMI Informal. Sebaran pengiriman PMI terbanyak pada 2021 adalah di Hongkong, Taiwan, Italia, Singapura, Polandia.¹¹

¹⁰ “International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families | OHCHR,” diakses April 3, 2022, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

¹¹ Kompas.com, “Ini Negara Yang Paling Banyak Diserbu Pekerja Migran Indonesia Halaman All - Kompas.Com,” Dimodifikasi Maret 6, 2022, diakses Maret 30, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/06/103730826/ini-negara-yang-paling-banyak-diserbu-pekerja-migran-indonesia?page=all>.

Gambar 1.2 Bagan 5 Negara Penerima PMI Terbanyak 2021



Sumber: BP2PMI, 2021

Pada 2020, jumlah PMI mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan terjadi di Taiwan, sebelum pandemi PMI yang berangkat dapat mencapai 79.573 sedangkan setelah pandemi PMI yang berangkat hanya mencapai 7789, secara persentase pada 2021 terjadi penurunan sebesar 90% dari tahun 2019. Sedangkan di Italia, Singapura, dan Polandia mengalami kenaikan jumlah PMI pada 2021, namun jumlah ketiga negara tersebut masih tidak sebanyak penerimaan PMI di Hongkong dan Taiwan. Panyaman (2022) selaku pengamat ketenagakerjaan mengatakan bahwa penurunan ini merupakan dampak dari Pandemi Covid-19. Penyebab utamanya adalah menurunnya permintaan dan keterbatasan untuk melatih calon PMI sebelum diberangkatkan.¹² Jika dilihat dari negara penerima,

¹² Annasa Rizki Kamalina, "Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Diramal Masih Menurun - Ekonomi Bisnis.Com," Dimodifikasi Maret 28, 2022, diakses Maret 30, 2022,

mereka memiliki kasus Covid-19 yang cukup tinggi dan mengharuskan pemerintah untuk membatasi perjalanan luar negeri demi mencegah penyebaran virus karena mobilisasi manusia di jalur internasional. Hal tersebut terjadi di Taiwan. Taipei Economic and Trade Office (TETO) menjelaskan bahwa tercatat 70 kasus Covid-19 impor sejak 18 Oktober 2020 hingga 18 November 2020, dan 28 kasus tersebut merupakan PMI. Kedua pihak, Indonesia dan TETO saling memahami bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk mengirimkan PMI yang positif ke Taiwan.¹³

Pada dasarnya Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik seperti negara lain yang mempunyai kedutaan sebagai representasi, karena Indonesia masih mengakui kebijakan *One China Policy*. Meskipun Indonesia masih mengakui kebijakan tersebut, Taiwan menjadi salah satu aktor yang berpengaruh dalam menjalin kerja sama ekonomi. Perwakilan diplomatik Taiwan di Indonesia diwakili oleh TETO, sehingga jika ada agenda luar negeri antar kedua negara yang bertanggung jawab adalah TETO dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan (KDEI).¹⁴ Hubungan baik Indonesia dan Taiwan didorong oleh perkembangan ekonomi Taiwan yang pesat sejak akhir 1960-an. Saat itu

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220328/12/1516016/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-diramal-masih-menurun>.

¹³ Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Taiwan Bantah Anggap Indonesia Sengaja Kirim TKI Positif Covid-19 - Dunia Tempo.Co," Dimodifikasi November 21, 2020, diakses Maret 30, 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1407449/taiwan-bantah-anggap-indonesia-sengaja-kirim-tki-positif-covid-19/full&view=ok>.

¹⁴ Eni Shintia, "Kepentingan Pemerintah Indonesia Dalam Menjalinkan Hubungan Dagang Dengan Taiwan," *JOM FISIP* 6 (2019): 1–14.

Indonesia juga merasa bahwa Taiwan mempunyai teknologi yang unggul sehingga dapat menawarkan transfer sumber daya antar dua pihak.¹⁵

Oleh karena itu, peran *people-to-people relations* sangat penting untuk mendorong strategi diplomatik Taiwan. Selain negara, aktor non-negara juga banyak terlibat dalam membantu proses migrasi para PMI. Seperti agen penyalur tenaga kerja, aktor ini menjadi sangat esensial dalam dinamika migrasi internasional. Ida Fauziyah (2021) selaku menteri ketenagakerjaan mengatakan bahwa ada kecenderungan PMI mendapatkan agen penyalur yang ilegal, sehingga proses dan status para PMI juga tidak sah. Akibatnya PMI menjadi terlantar dan tidak memiliki perlindungan yang sah, seperti yang terjadi pada 129 PMI dari Taiwan. Indonesia berupaya memulangkan mereka melalui program repatriasi. Sejumlah 105 PMI dari 129 orang berstatus terlantar di perairan Taiwan sebagai awak kapal Letter of Guarantee (LG).¹⁶

Tidak hanya agen penyalur PMI, agen pengembangan sumber daya manusia PMI juga sangat berperan penting. Pengembangan sumber daya manusia dapat berupa bahasa, keterampilan, dan pengetahuan kultur negara penerima. Pada penelitian ini akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berupa pendidikan dengan studi kasus Community Learning Center Bhakti Jaya Indonesia (CLC BJI) di Taiwan.

¹⁵ Ali Maksum, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad, "Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 80–96.

¹⁶ Suci Sedya Utami, "Menaker Minta Pekerja Migran Pilih Agen Penyalur Legal Dan Bertanggung Jawab - Medcom.Id," *Medcom.Id*, Dimodifikasi July 26, 2021, diakses April 3, 2022, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8N0wXjEK-menaker-minta-pekerja-migran-pilih-agen-penyalar-legal-dan-bertanggung-jawab>.

Alasan memilih CLC BJI adalah berbeda dengan lembaga pendidikan PMI di negara lain. Misalnya Community Learning Center (CLC) di Sabah, Malaysia, merupakan aktor negara karena masih berada dan dibina langsung oleh Pemerintah Indonesia (Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).¹⁷ Selain itu, CLC BJI juga lebih berfokus pada pendidikan *post-migration* atau pendidikan yang diperuntukkan kehidupan setelah kembali ke tanah air.

CLC BJI merupakan aktor non negara yang berupa lembaga pendidikan Indonesia yang beroperasi di Taiwan. Tujuan dari CLC BJI adalah membekali PMI dengan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan sebagai bekal kembali ke Indonesia. Sehingga jangkauan penelitian ini berada pada peran CLC BJI dalam memberikan pendidikan non formal dengan tujuan kehidupan PMI *post-migration* atau pasca migrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah **“Bagaimana peran aktor non-negara Bakti Jaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan pekerja migran Indonesia di Taiwan (2021)?”**

Rumusan masalah tersebut diajukan dengan beberapa justifikasi sebagai berikut, (1) Bakti Jaya Indonesia sebagai objek penelitian karena program dari

¹⁷ “Community Learning Center (CLC) - Direktorat Sekolah Dasar,” diakses April 3, 2022, <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/community-learning-center-clc>.

aktor tersebut berbeda dengan lembaga atau agen pengurus PMI, yaitu pendidikan yang diberikan mempunyai tujuan pengembangan sumber daya manusia (SDM) para PMI saat kembali ke tanah air; (2) Taiwan adalah wilayah tersebut menjadi tempat kedua dengan jumlah PMI terbanyak pada 2021, selain itu Taiwan dan Indonesia juga tidak mempunyai kedutaan sebagai perwakilan negara, sehingga hubungan Indonesia dan Taiwan cukup unik; (3) Pada 2021 tren pekerja migran cukup menurun drastis karena dampak dari pandemi.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi ilmu politik dan sosial bagi masyarakat dan akademisi dalam bentuk penelitian ilmiah. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk memenuhi salah satu syarat akhir yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di program studi Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran aktor non-negara Bakti Jaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan pekerja migran Indonesia di Taiwan (2021). Selain itu, argumentasi yang diangkat dalam penelitian ini merupakan studi

mainstream dari penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dengan topik yang sama namun variabel yang berbeda.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

Pada sub-bab ini akan memaparkan kerangka teori dan konsep yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan akan berfokus pada peran NGO pada pendidikan, dan konsep yang dijelaskan adalah konsep pendidikan nonformal. Hal tersebut akan berkaitan dengan analisis Peran CLC BJI sebagai aktor non negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan PMI serta bentuk pendidikan yang diberikan kepada PMI adalah pendidikan non formal.

1.4.1.1 Peran *Non-Governmental Organization* dalam Pendidikan

Istilah NGO diciptakan pada 1946 dalam Piagam PBB dan telah diakui secara luar dalam dua puluh tahun terakhir. NGO mempunyai definisi yang berbeda tergantung pada beberapa karakteristik seperti jangkauan ukuran, tujuan, struktur organisasi, sumber daya, hingga konteks geopolitik NGO beroperasi.¹⁸

World Bank mendefinisikan NGO sebagai organisasi swasta yang mempunyai aktivitas dalam meringankan beban dan mempromosikan keinginan masyarakat yang rentan. melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial, atau mendorong pembangunan masyarakat (*community development*). Clarke (1998 dalam Julius,

¹⁸ Nizeyimana Julius, *Research Report*. "The Role Of Ngos And Education Service Delivery In Uganda, A Case Study Of Unicef-NGO," *The College Of Humanities And Social Science Of Kampala University*, 2019.

2019) mendefinisikan NGO sebagai organisasi swasta, non-profit, profesional, yang berada di bawah hukum legal dan mempunyai tujuan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Willetts (2001 dalam Julius, 2019) menyatakan bagaimanapun definisi NGO yang diterima secara umum dapat berbeda dengan definisi yang dari negara, tergantung pada persepsi sosial dan politik mereka.¹⁹ NGO juga didefinisikan sebagai gerakan Individu secara kolektif untuk mengejar tujuan politik, ekonomi, dan sosial dan terorganisir di tingkat lokal, nasional, atau internasional yang mempunyai kesamaan tujuan (*pursue shared goals*).²⁰ Perdebatan NGO sebagai lembaga yang profit dan non-profit juga masih berlanjut, NGO juga tidak bebas bunga, bahkan jika mereka bersifat non-profit, faktanya banyak praktik NGO konvensional pada yang hanya tentang mempertahankan kekuasaannya. Meskipun banyak perdebatan dalam literatur akademis dan di antara praktisi, tidak ada konsensus mengenai kriteria mana yang harus dipenuhi NGO agar dianggap sebagai aktor yang sah dalam hubungan internasional.²¹

Korten (1987) membagi NGO menjadi 3 kategori. Pertama, *relief NGO* yang bergerak untuk membantu saat terjadi bencana alam dan proses pemulihan. Tidak hanya hal tersebut, mereka juga membantu korban perang atau bencana yang terjadi karena akibat tangan manusia, serta bantuan kemanusiaan lainnya (Martinussen & Pedersen, 2003 dalam Korten, 1987). Bentuk kerja mereka dapat berupa

¹⁹ Ibid. hal 6.

²⁰ Muhammad Muyamin, "Peran Aktif NGO Humana Dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Sabah Malaysia," *Indonesian Perspective* 4, no. 2 (2019): 100–117; Akhila Pai H, "Role Of NGOs in Achieving Skill India Mission : A Conceptual," *Cosmos Impact Factor* 4.236 5, no. 4 (2018): 2016–2019.

²¹ Inger Ullerberg, "The Role and Impact of NGOs in Capacity Development: From Replacing the State to Reinvigorating Education," *International Institute for Educational Planning* (2009): 48.

mendistribusikan makanan, air bersih, obat-obatan, menyiapkan tempat aman sementara bagi korban.²²

Kedua adalah *development NGO*, tujuan utama NGO ini adalah untuk melakukan projek pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kemiskinan dan pembangunan ekonomi sosial. Secara umum, mereka biasanya membantu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dari *grassroot level* atau tingkat lapisan kelompok yang tidak dapat dicakup oleh pemerintah karena limitasi sumber daya.²³ Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa kinerja NGO ini lebih efektif daripada pemerintah dalam membantu masyarakat lokal untuk mengatur sumber daya yang lebih berkelanjutan.²⁴

Kategori ketiga adalah NGO advokasi, yang mempunyai tujuan untuk mengadvokasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Umumnya mereka jarang menjalankan operasi lapangan secara langsung. Sebaliknya, mereka berusaha mengubah kebijakan khusus negara seperti hak asasi manusia dan masalah lingkungan. Contohnya adalah Amnesty International, mereka telah mencoba mengubah paradigma hak asasi manusia di banyak negara selama beberapa dekade terakhir.²⁵

²² David Potter, Robert; Binns, Tony; Elliott, Jennifer; Nel, Etienne; Smith, *Geographies of Development An Introduction to Development Studies* (Routledge, 2018); Nizeyimana Julius, "The Role Of Ngos And Education Service Delivery In Uganda, A Case Study Of Unicef-NGO", 13.

²³ Katie Willis, *Theories and Practices of Development*, 2nd ed. (New York, 2011).; Nizeyimana Julius, "The Role Of Ngos And Education Service Delivery In Uganda, A Case Study Of Unicef-NGO", 12

²⁴ Willis, *Theories and Practices of Development*., 12

²⁵ Youngwan Kim, "The Unveiled Power of NGOs: How NGOs Influence States' Foreign Policy Behaviors," *ProQuest Dissertations and Theses* (2011): 195-n/a, <https://iro.uiowa.edu/esploro/outputs/doctoral/The-Unveiled-power-of-NGOs-how/9983777390802771>.

Pada pertengahan abad 20, *NGO* telah berkembang menjadi aktor penting dalam hubungan internasional melalui keterlibatannya dalam menjalin hubungan dengan negara hingga *International Governmental Organisations* (IGOs). Interaksi antara *NGO* dan aktor-aktor hubungan lainnya mendorong kemunculan *world society* dan masuk dalam era *politic beyond the state*.²⁶ Selain itu, pendekatan *NGO* terhadap pembangunan didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat. Saat ini *NGO* semakin mendapatkan perhatian dan dipandang sebagai lembaga alternatif dalam mempromosikan kesadaran, perubahan dan pembangunan di masyarakat. Mereka secara ekstensif terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Mereka berada dalam posisi untuk memberikan layanan sosial ke berbagai bagian masyarakat di mana negara gagal menyediakan layanan tersebut.²⁷

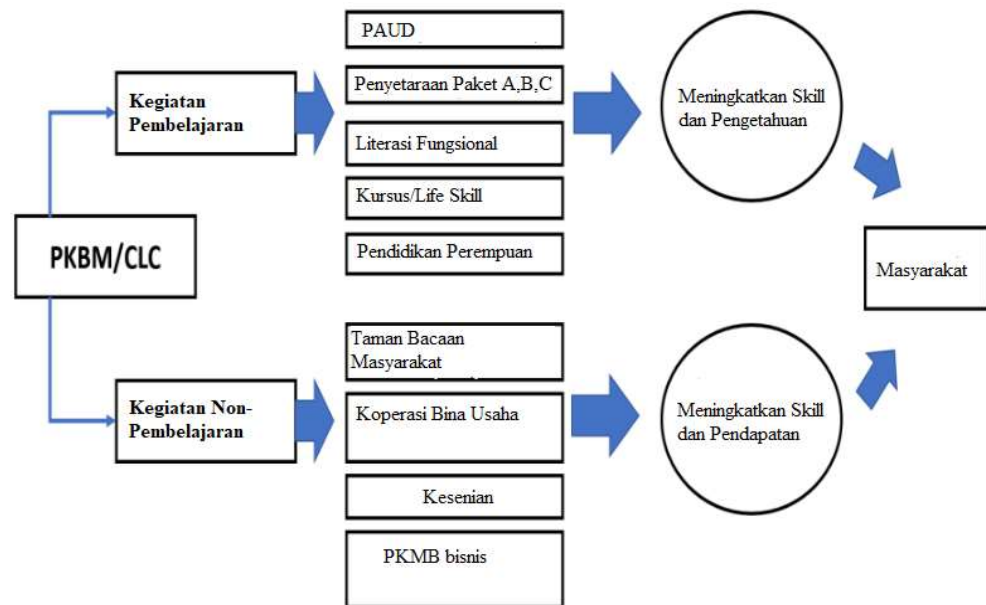
Pada negara berkembang, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, *NGO* mempunyai peran cukup besar dalam mengisi dukungan pengembangan pendidikan yang tidak dapat sepenuhnya diberikan oleh pemerintah. Pada studi kasus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Pintar sebagai *NGO* yang bergerak dalam pendidikan. PKBM mempunyai peran secara garis besar dibedakan menjadi dua program, yaitu *learning program* dan *business program*. Kedua program tersebut dirangkai dalam

²⁶ Johnson dan Prakash. Op.Cit. Muhammad Muyamin, “Peran Aktif *NGO* Humana Dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Sabah Malaysia,” *Indonesian Perspective* 4, no. 2 (2019): 100–117.

²⁷ OECD Busan Partnership for Effective Development Co-operation: Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan, Republic of Korea, 29 November - 1 Desember 2011, OECD Publishing, Paris, (2011), <https://doi.org/10.1787/54de7baa-en>.

tipe pendidikan nonformal dan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan nonformal yang diselenggarakan telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.²⁸ Ruang lingkup program PKBM di Indonesia terbagi menjadi dua program yaitu program pembelajaran dan program bisnis, di antara program tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Bagan PKMB Program dan Aktivitas



Sumber: Prosedur dan Standard untuk Mengimplementasikan PKMB, 2012

Pada tulisan Fayyaz Baqir (1997) dalam buku *Education and The State: Fifty Years of Pakistan* menjelaskan bahwa peran NGO dalam pendidikan adalah menolak mitos-mitos cara kerja pendidikan tradisional seperti “pendidikan adalah

²⁸ Y Shantini, D Hidayat, and L Oktiawanti, “Community Learning Center in Indonesia: Managing Program in Nonformal Education,” *International Journal of ...* 6, no. November (2019): 522–532, <http://www.academia.edu/download/63642813/IJRR006620200616-32221-q3415h.pdf>.

nama lain dari sekolah formal”. Baqir percaya bahwa NGO mempunyai peran dalam memberikan pendidikan alternatif yang lebih fleksibel untuk ditawarkan melalui pembelajaran jarak jauh, program literasi fungsional serta pendidikan berkelanjutan dan nonformal. Kurangnya kesadaran akan keuntungan pendidikan alternatif berbasis kurikulum yang berfokus langsung pada kebutuhan khusus dari spesifik siswa, waktu yang singkat untuk menyelesaikan studi, jam belajar yang fleksibel dan penggunaan teknik pengajaran yang tidak konvensional telah menghambat kemajuan literasi fungsional di tingkat akar rumput.²⁹

NGO juga berperan dalam mendorong kepedulian pemerintah dan masyarakat pada pendidikan. Pada titik ini, partisipasi masyarakat menjadi penting karena dua alasan mendasar. Pertama, partisipasi masyarakat memperkenalkan unsur relevansi dan akuntabilitas pada sistem pendidikan kita. Hal ini membuat pendidikan bermakna dan menarik bagi siswa, membantu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, kerja sama NGO dan masyarakat dalam menciptakan lingkup pendidikan yang lebih kecil akan menjadi solusi alternatif dalam kurangnya sumber daya.³⁰ Misalnya sekolah masjid yang dikelola kelompok NGO di level desa akan membantu meningkatkan literasi keagamaan bagi para siswa.

Secara umum, Ulleberg (2009) menyebutkan bahwa NGO mengambil peran mengisi kesenjangan, yaitu melakukan kegiatan penyediaan pendidikan di mana

²⁹ Hoodbhoy, “Education and State, Fifty Years of Pakistan,” in *Journal of Education*, vol. 97, 1998, 1–17.

³⁰ Ibid., 16.

pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya atau tidak menganggapnya sebagai prioritas. Aksi NGO sering digambarkan sebagai gerakan berskala kecil, fleksibel, dinamis, adaptif, lokal, efisien, dan inovatif. Ini yang membuat peran NGO berbeda dengan pemerintah, pemerintah tidak memungkinkan fleksibilitas yang diperlukan untuk bereksperimen dengan pendekatan pendidikan baru.³¹

Pada level kerja sama antara NGO dan negara berada di level administratif. Bentuk administratif yang diimplementasikan dapat berupa pengesahan nota kesepahaman (MoU) dan negosiasi dengan aktor negara.³² Kerja sama NGO dan negara terbentuk adanya kepercayaan dalam menumbuhkan komitmen yang sama. Pada level ini, kerja sama yang terjalin di *host country* diperlukan pengenalan kultur setiap negara sehingga menemukan satu kesepahaman.³³

Kerja sama NGO dan pemerintah *host country* juga dapat berada di takaran politik. Xiong dan Li (2017) menjelaskan bahwa kondisi migran yang berpenghasilan rendah dan terjerat kemiskinan di *host country* mendorong NGO untuk mengubah strategi dari memberikan bantuan materi “*spreading the kindness*” menuju pembangunan kapasitas “*building new citizenship*”. Pada awalnya komunitas migran mengambil langkah sendiri untuk mendirikan

³¹ Inger Ulleberg, “The Role and Impact of NGOs in Capacity Development: From Replacing the State to Reinvigorating Education,” *International Institute for Educational Planning* (2009): 12.

³² David Humphreys (1996) Regime theory and non-governmental organisations: The case of forest conservation, *The Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, 34:1, 90-115, DOI: [10.1080/14662049608447718](https://doi.org/10.1080/14662049608447718)

³³ Jeane Talakua., dkk, “Analisis Kerjasama Aktor-Aktor Non Pemerintah dalam Peningkatan Sumber daya Manusia Sebagai Indikator keberhasilan Pembangunan Pendidikan.” *Jurnal Universitas Kristen Satya* (2016), 120-144.

mengoperasikan sekolah untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak migran yang lahir di *host country* maupun yang dibawa dari negara asal. Tapi secara kontroversial, NGO dan pemerintah *host country* bekerja sama untuk menjaga stabilitas sosial untuk melakukan kegiatan pendidikan yang lebih pragmatis dan lokalis. Peran NGO dalam pendidikan yang kontroversial adalah membangun warga negara baru "*Building new citizens*", hal ini ditujukan untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai dan menumbuhkan anak-anak migran sebagai generasi baru yang berbeda dari generasi orang tuanya.³⁴

Prevalensi NGO sering dianggap sebagai tanda masyarakat sipil yang berfungsi dengan baik, mereka diharapkan berkontribusi pada demokrasi di negara berkembang dan membangun struktur bantuan yang demokratis. Peran masyarakat sipil sebagai *watchdog* meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses pembangunan.³⁵

1.4.1.2 Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah konsep yang sangat terkenal dan dipromosikan di negara-negara Eropa Barat dan telah dikenal booming selama beberapa dekade terakhir. Pendidikan nonformal pertama kali muncul sebagai sebuah konsep di akhir tahun 80an. Alasan mengapa segmen pendidikan ini mendapat perhatian yang besar adalah karena diakui bahwa pendidikan formal tidak dapat lagi memenuhi

³⁴ Yihan Xiong and Miao Li, "Citizenship Education as NGO Intervention: Turning Migrant Children in Shanghai into 'New Citizens,'" *Citizenship Studies* 21, no. 7 (2017): 792–808, <http://doi.org/10.1080/13621025.2017.1353741>.

³⁵ *Ibid.*, 13

apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Meskipun kita masih menyaksikan monopoli lembaga pendidikan formal, pendidikan nonformal semakin berkontribusi pada proses pembelajaran kehidupan dan pengembangan sumber daya manusia.³⁶

Dampak dan nilai tambah pendidikan nonformal di masyarakat saat ini telah disorot oleh lembaga-lembaga seperti UNESCO, Dewan Eropa dan Komisi Eropa yang telah mencoba untuk membuat inventarisasi fitur, prinsip, metode, dan kegiatan yang berjalan di lingkup pada konsep ini. Sebagai contoh, UNESCO (1997) membandingkannya dengan pendidikan formal yang menunjukkan bahwa pendidikan informal dapat berlangsung baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Hal tersebut bergantung pada konteks negara, pendidikan dapat mencakup program pendidikan untuk menanamkan literasi orang dewasa, pendidikan dasar untuk anak-anak yang akan bersekolah di luar negeri, keterampilan hidup, keterampilan kerja dan budaya umum.³⁷

Dewan Eropa (1999) juga mendefinisikan pendidikan nonformal, dalam korelasinya dengan bentuk-bentuk pendidikan tradisional, yang menyebutkan bahwa pendidikan itu dapat dilakukan ‘di luar’ tetapi dengan melengkapi kurikulum pendidikan formal dan dirancang untuk meningkatkan jangkauan keterampilan dan kompetensi siswa. Bagi Uni Eropa, pendidikan nonformal

³⁶ Alina-gabriela Burlacu, “The Importance of Non-Formal Education and the Role of NGOs in Its Promotion,” *Academic Excellence Workshop* (2012): 863–867, <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Importance-of-Non-Formal-Education-and-the-Role-Burlacu/442caf9c215e5646275434c949720ee71ead1840>.

³⁷ UNESCO, “International Standard Classification of Education,” (1997): http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/iscled_1997.htm.

sebagai metode pembelajaran sepanjang hayat sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kewarganegaraan yang aktif dan meningkatkan kemampuan kerja.³⁸

Dibandingkan dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal tidak kronologis, hierarkis atau ditujukan untuk segmen. Interaksi antara kedua konsep tersebut terlihat sebagai tiga lingkaran konsentris, yang dikenal sebagai ASK Model (Aegee Europe, 2008). ASK, berasal dari *attitude, skill, and knowledge*. Pola tersebut menggambarkan fakta bahwa satu lingkaran pengetahuan tidak cukup untuk pengembangan siswa dan tidak dapat mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat dan memperoleh pekerjaan. Untuk mencapai tujuan ini, pembelajaran harus terdiri dari dimensi kognitif, dimensi sosial, dan dimensi praktis.³⁹

Pada *formal, non-formal and informal learning* yang diterbitkan Dewan Eropa, tiga jenis pendidikan dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Pendidikan Formal, Informal, dan Nonformal

Formal	Informal	Nonformal
Terstruktur dan Terencana Intensional dari perspektif siswa Mengarah pada sertifikasi	Tidak terstruktur Tidak Intensional Tidak mengarah pada sertifikasi	Terstruktur Intensional dari perspektif siswa Tidak mengarah pada sertifikasi

Sumber: *European Commission (2001)*

³⁸ Commission of The European Communities, *Making a European Area of Life Long Learning a Reality, Communication From Commission*, COM(2001) 678 final (Brussels, 2001).

³⁹ Ibid.

Pembelajaran nonformal terjadi di luar lingkungan belajar formal tetapi dalam beberapa jenis kerangka organisasi. Ini muncul dari keputusan sadar pelajar untuk menguasai aktivitas tertentu, keterampilan atau bidang pengetahuan, serta tidak ada batasan usia dalam menempuh pendidikan nonformal. Tapi itu tidak perlu mengikuti silabus formal atau diatur oleh akreditasi dan penilaian eksternal. Pekerja Migran dewasa terlibat dalam pembelajaran bahasa nonformal ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan terorganisir yang menggabungkan pembelajaran dan penggunaan bahasa target mereka dengan perolehan keterampilan tertentu atau pengetahuan yang kompleks.⁴⁰

Peningkatan SDM diberikan dalam rangkaian pendidikan non-formal. Konsep pendidikan non-formal antar institusi dapat mempunyai definisi yang berbeda. Namun dalam beberapa kasus, pendidikan non-formal diakui sebagai bagian penting dari *national lifelong learning strategies*, dengan beberapa kasus mengacu pada kesempatan pendidikan untuk orang dewasa.

Bentuk-bentuk pendidikan dapat dibedakan menurut tingkat organisasi dan struktur, kondisi dimana pembelajaran berlangsung, fungsionalitas dan penerapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan tingkat sertifikasi hasil belajar. Pada Bagan 1, CEDEFOP (European Center for the Development of Vocational Training) mendefinisikan pendidikan formal dengan pada proses belajar di lingkungan yang terorganisir dan terstruktur, seperti di lembaga pendidikan, pelatihan, atau di tempat kerja. Pendidikan formal biasanya diselenggarakan

⁴⁰ Council of Europe, *Formal, Non-Formal and Informal Learning*, n.d., diakses April 19, 2022, <https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning>.

sebagai pendidikan penuh waktu dan diselenggarakan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Sedangkan pendidikan nonformal adalah semua jenis pembelajaran terstruktur dan terorganisir yang dilembagakan, disengaja dan direncanakan oleh penyelenggara pendidikan, tetapi tidak mengarah pada tingkat kualifikasi formal yang diakui oleh otoritas pendidikan nasional terkait (CEDEFOP, 2014). Sementara itu, Sirius Watch pada *Policy Network on Migrant Education* menuliskan bahwa pendidikan non-formal mempunyai fungsi untuk memfasilitasi inklusivitas para migran, yaitu dengan (1) Pendidikan non-formal menjadi jembatan atau penghubung dengan pendidikan formal; (2) melawan segregasi social; (3) dukungan akademik dan emosional; (4) dukungan linguistik; (5) meningkatkan dan mengenalkan perbedaan norma dan budaya; (6) mencegah radikalisme dan kekerasan; dan (7) mengatasi trauma dan membangun ketahanan diri.⁴¹

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa prinsip dan karakteristik pendidikan nonformal adalah pelajar mempunyai motivasi dan melakukannya dengan sukarela dan mandiri, program erat dengan minat dan aspirasi peserta, pendekatannya yang berpusat pada peserta didik, dan lingkungan belajar yang mendukung.

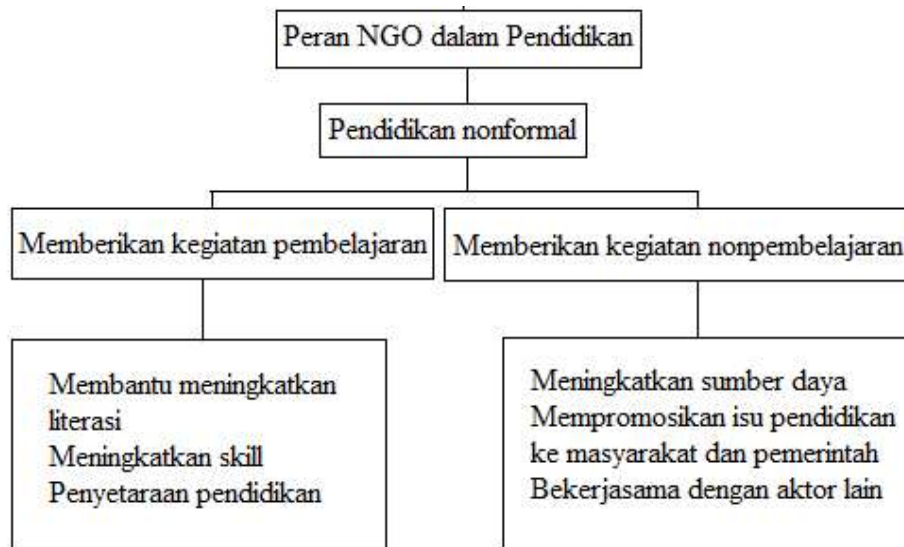
Saat ini, NGO adalah penyedia utama pendidikan nonformal melalui program-program mereka. NGO membawa peran besar dalam menyiratkan promosi kegiatan dan meningkatkan kesadaran akan dampak dan pentingnya pendidikan nonformal di sekolah, universitas, lembaga publik dan sektor bisnis. Mereka juga

⁴¹ Karolina Lipnickienė, Hanna Siarova, and Loes Van Der Graaf, “Role of Non-Formal Education in Migrant Children Inclusion: Links with Schools (Synthesis Report)” (2018): 58.

harus mendorong kegiatan lobi untuk memasukkan metodologi pendidikan nonformal ke dalam kurikulum tradisional yang disediakan oleh lembaga pendidikan formal. Di sisi lain, penting bagi NGO untuk membuat kegiatan mereka dapat diakses dan menarik untuk semua jenis kelompok sasaran untuk mencakup wilayah domain yang luas. NGO harus memastikan promosi kegiatan melalui media dan semua saluran komunikasi yang tersedia seperti kelompok sosialisasi, forum, dll.⁴²

1.5 Sintesa Pemikiran

Skema di bawah secara singkat menjelaskan alur penelitian dimulai dengan pendekatan teoritis diikuti oleh kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1.4 Sintesa Pemikiran Penelitian

Sumber: diolah oleh penulis

⁴² Burlacu, "The Importance of Non-Formal Education and the Role of NGOs in Its Promotion.", 866

Sintesa pemikiran di atas diekstrak dari tinjauan literatur dari kerangka berpikir pada sub bab sebelumnya. Terdapat kesamaan peran antar NGO yang bergerak dalam pendidikan di setiap negara. Secara umum, terdapat kesamaan tentang peran NGO adalah sebagai aktor yang memberikan pendidikan nonformal. Beberapa peneliti terdahulu lebih banyak memaparkan program-program sebagai kerangka teoritis, secara garis besar program tersebut dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah peran NGO dalam pendidikan nonformal dengan memberikan kegiatan pembelajaran, terdapat 3 kegiatan pembelajaran yang sama pada setiap penelitian terdahulu, yaitu literasi, peningkatan skill, dan penyetaraan pendidikan. Sedangkan pada kegiatan nonpembelajaran, NGO lebih banyak bergerak pada meningkatkan sumber daya, mempromosikan isu pendidikan, dan menjalin kerja sama dengan aktor lain.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama pada penelitian ini adalah BJI mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pendidikan PMI di Taiwan melalui pendidikan nonformal. Hal tersebut menjadi penting karena program atau kegiatan BJI ditujukan sebagai bekal PMI pasca migrasi. Kerap kali NGO atau agensi pendidikan untuk migran memberikan pendidikan sebelum keberangkatan sebagai pembekalan atau upaya adaptasi dan preparasi, namun sering dilupakan bahwa para migran menjadi tidak produktif setelah kembali ke Indonesia. Oleh karena itu,abs

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Peneliti menemukan fakta yang sebenarnya dengan memperhatikan kondisi yang ada. Studi deskriptif digunakan karena untuk memperoleh informasi mengenai status terkini dari fenomena untuk menggambarkan “apa yang ada” berkenaan dengan variabel atau kondisi dalam suatu situasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dengan fakta yang faktual dan akurat.⁴³ Koentjaraningrat (1994) juga menyetujui bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.⁴⁴ Penelitian deskriptif tidak berhenti mendeskripsikan suatu fenomena tanpa menganalisisnya. Pada penelitian ini juga memberikan penguraian dan penafsiran data yang faktual, sehingga akan mendapatkan elaborasi antara data yang disajikan dengan kerangka teori yang digunakan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Tujuan dari CLC BJI adalah membekali PMI dengan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan sebagai bekal kembali ke Indonesia. Sehingga jangkauan penelitian ini berada pada pendidikan untuk *post-migration*. Peneliti merujuk spesifikasi pada tahun 2021, karena subjek penelitian mempunyai program yang lebih aktif daripada tahun sebelumnya.

⁴³ Mohtar Mas'ood. 2003. Disiplin dan Metodologi., 262

⁴⁴ Koentjaraningrat. 1994. Metode-Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama., 29

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang terlibat berkisar dari survei yang menggambarkan *status quo*, studi korelasi yang menyelidiki hubungan antar variabel, hingga studi perkembangan yang berusaha menentukan perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai sumber utama pengumpulan data dan analisis literatur terdahulu sebagai metode sekunder. Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder meliputi buku, jurnal online, dan portal berita internasional. Menurut Lamont (2015), sumber sekunder adalah dokumen-dokumen yang merujuk dan menganalisa sumber primer, tidak mengutip atau meliput kejadian asli dan justru mereferensikan kutipan atau liputan asli.⁴⁵

Wawancara dan penyebaran kuesioner dilakukan secara virtual/daring melalui *platform* Zoom dan Google Forms. Sedangkan kuesioner disebarkan kepada para PMI di Taiwan yang telah ditelaah melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Sehingga data penelitian yang diambil adalah responden yang mengetahui konteks penelitian dan berkesinambungan dengan tujuan serta maksud penelitian.⁴⁶

⁴⁵ Christopher K Lamont, "Research Methods in International Relations," *Research Methods in International Relations*, no. September (2015): 11–29.

⁴⁶ Rita Pawestri Setyaningsih, "Tenaga Kerja Indonesia Dalam Konteks Masyarakat Taiwan Yang Menua," *Jurnal Kajian Wilayah* 7, no. 2 (2016): 113; Paulus Rudolf Yuniarto, "Indonesian Migration Industry in Taiwan: Some Socio-Economic Implications and Improvement Challenges," *Jurnal Kajian Wilayah* 6, no. 1 (2016): 17–33, <https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/67>.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menafsirkan data set besar dan memungkinkan penelitian untuk mempelajari lebih dalam ke peristiwa tertentu, tempat, atau kepribadian. Namun, sebelum memulai pengumpulan data, sangat penting bahwa peneliti memiliki gagasan yang jelas tentang data apa yang akan dikumpulkan.⁴⁷ Teknik analisis ini juga dikenal dengan analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk menelaah atau menilai dokumen-dokumen baik tercetak maupun elektronik.⁴⁸ Telaah dokumen-dokumen tersebut lalu dianalisis secara sosial politik yang nantinya akan menghasilkan konteks sosial politik.

Perlu diketahui meskipun dalam penelitian ini penulis menggunakan data statistik yang mengarah pada metode kuantitatif, itu tidak diproses menjadi model matematika atau ekonometrika tetapi hanya statistik deskriptif. Berdasarkan Nicholson (2002: 24) di Lamont (2015), "... Metode kuantitatif mencakup lebih dari sekadar statistik deskriptif ". Sehingga statistik deskriptif tidak dapat dikatakan sebagai metode kuantitatif.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab utama. Empat bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

⁴⁷ Lamont, "Res. Methods Int. Relations."

⁴⁸ Glenn Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal*, 9, no. 2 (2009): 27–40.

BAB I dimulai dengan metodologi penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang mencakup landasan teori dan konseptual, lalu tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan sistematika penulisan,

BAB II pada bab ini akan menguraikan profil objek penelitian yaitu Yayasan Bakti Jaya Indonesia di Taiwan. Penulis juga akan menjelaskan kondisi atau fenomena perkembangan pendidikan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, hal ini perlu dijelaskan agar dapat menjadi justifikasi penelitian bahwa kondisi PMI di Taiwan memang diperlukan peran BJI.

BAB III merupakan pembahasan mengenai analisis peran CLC BJI dalam memberikan pendidikan nonformal sebagai upaya peningkatan kualitas PMI di Taiwan. Analisis peran CLC BJI akan dibagi menjadi dua, yaitu peran pembelajaran dan peran non pembelajaran

BAB IV merupakan kesimpulan dan kalimat penutup. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara ringkas. Pada bab ini juga akan dipaparkan saran yang diharapkan dapat berguna bagi objek penelitian, pemerintah, masyarakat umum, serta untuk peneliti selanjutnya dengan fokus peran NGO dalam meningkatkan kualitas pendidikan migran.